



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH**

**RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI  
DENGAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA RI,  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI,  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI,  
KEPALA ARSIP NASIONAL RI, DAN KETUA OMBUDSMAN RI**

- Tahun Sidang : 2024-2025  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- : --  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari & Tanggal Rapat : Selasa, 10 September 2024  
Waktu Rapat : Pukul 11.37 s.d. 13.17 WIB  
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III  
Gedung Nusantara I DPR RI  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Ketua Rapat : Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.  
(Ketua/F-PG)
- Acara Rapat : Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025
- Sekretaris Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H.  
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir : 25 dari 50 orang Anggota dengan rincian:  
A. ANGGOTA DPR RI  
PIMPINAN:  
1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.  
(Ketua/F-PG)  
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.  
(Wakil Ketua/F-PDIP)  
3. Saan Mustopa, M.Si.  
(Wakil Ketua/F-Nasdem)  
4. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.  
(Wakil Ketua/F-PPP)
1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN  
7 orang Anggota dari 12 Anggota:  
1. Arif Wibowo

2. Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
  3. H. Heru Sudjatmoko
  4. Riyanta, S.H.
  5. Masinton Pasaribu
  6. H. Arteria Dahlan
- 
2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
5 orang Anggota dari 7 Anggota:
    1. Drs. H. Riswan Tony D. K.
    2. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
    3. Agung Widyantoro, S.H., M. Si.
    4. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M. H., M. Kn.
- 
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA  
2 orang Anggota dari 7 Anggota:
    1. Heri Gunawan, S.E.
    2. Drs. Difriadi
- 
4. FRAKSI PARTAI NASDEM  
3 orang Anggota dari 5 Anggota:
    1. Aminurokhman, S.E., M.M.
    2. Kamran Mochtar Podomi, S.T.
- 
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
0 orang Anggota dari 4 Anggota:  
-
- 
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
2 orang Anggota dari 5 Anggota:
    1. Reza Oktoberia, S.H.
    2. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.
- 
7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
    1. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
    2. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
- 
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
    1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
    2. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin
- 
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN  
2 orang Anggota dari 2 Anggota:
    1. Dra. Hj. Munawaroh

**B. UNDANGAN**

1. Menteri Pendayaan Aparatur Negara RI  
(Abdullah Azwar Anas, M.Si.);
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI  
(Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum.);
3. Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI  
(Dr. Muhammad Taufiq, DEA.);
4. Plt. Kepala Arsip Nasional RI  
(Drs. Imam Gunarto, M.HUM.);
5. Ketua Ombudsman RI  
(Mohammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D.)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

Rapat Paripurna menyampaikan Anggota KPU yang baru. Sudah harus lapor.

Kita mulai, ya.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**ANGGOTA RAPAT:**

*Walaikumsalam.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

Selamat siang,  
Salam sejahtera buat kita semua,

**Yang terhormat saudara Menteri PAN-RB beserta seluruh jajaran,  
kemudian**

**Yang terhormat saudara Plt. Kepala BKN beserta seluruh jajaran,**

**Yang terhormat saudara Plt. Kepala LAN beserta seluruh jajaran,**

**Yang terhormat saudara Kepala ANRI beserta seluruh jajaran, dan**

**Yang terhormat saudara Ketua ORI beserta seluruh jajaran, dan**

**Yang tentu sama-sama kita hormati seluruh Pimpinan, Anggota Komisi II  
DPR RI,**

Tentu pertama kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu  
wa taala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-

Nya kepada semua. Sehingga, kita pada hari ini masih dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, terutama tanggung jawab di bidang konstitusional. Kami di DPR dalam bidang anggaran dalam keadaan sehat *walafiat*.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat hari ini sudah dihadiri seluruh perwakilan fraksi, sembilan fraksi yang ada di DPR. Oleh karena itu, saya sudah bisa menyatakan bahwa forum ini telah memenuhi kuorum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Oleh karena itu, perkenanlah saya untuk membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.37 WIB)**

Sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang berkenan hadir, bersedia memenuhi undangan kami dalam rapat pada hari ini. Terima kasih juga pada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Ini hari kedua kita melanjutkan rapat sejak kemarin dengan agenda tunggal yaitu, penyesuaian RKA-K/L RAPBN tahun 2025. Dan kemudian, nanti kita akan mengambil keputusan sekaligus penetapan RAPBN Tahun 2025. Apakah bisa kita setujui, Bapak/Ibu sekalian?

**(RAPAT: SETUJU)**

Dan tentu seperti biasa kita harus juga membatasi waktu dan ini mungkin rapat kita yang terakhir. Terutama, rapat tentang anggaran, ya.

Jadi, seperti yang saya sampaikan juga kepada mitra-mitra yang lain, empat tahun kemarin, empat kali kita bahas anggaran enggak ada masalah. Komisi II, *insya Allah*, enggak ada macam-macam kalau soal angka. Soal huruf-huruf baru macam-macam. Begitu. *Nah*, oleh karena itu, empat tahun terakhir kemarin enggak ada masalah, apalagi ini tinggal tahun terakhir. Itu yang pertama.

Yang kedua, kita sudah melaksanakan konsinyering kemarin. Panjang lebar dibahas. Jadi, seharusnya rapat ini tidak perlu terlalu lama. Oleh karena itu, saya menawarkan 12.30. Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

*Oke.*

*Nah* jadi, kami nanti persilakan kepada Saudara Menteri. Terus, nanti dilanjutkan oleh Plt. Kepala BKN, Plt. Kepala LAN, Kepala ANRI, dan Ketua ORI. Singkat-singkat saja, *highlight*-nya saja, ya. *Toh*, juga kemarin sudah

dilakukan pendalaman oleh seluruh Pimpinan, Anggota Komisi II dalam rapat-rapat konsinyering kemarin.

Kami persilakan.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):**

Baik.

Terima kasih.

Karena diminta singkat, kita akan singkat saja. Langsung ke halaman 12 nanti.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat siang,  
Salam sejahtera buat kita semua,

**Pak Ketua,  
Para Wakil Ketua,  
Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati,**

Duduk santai menonton drama,  
Sambil makan buah delima,  
PAN-RB dan DPR bekerja sama,  
Demi masyarakat kita tercinta,

Terima kasih.

**Yang kami hormati Pak Ketua dan Para Anggota, dan  
Yang kami hormati Pl.t Kepala LAN,  
Plt. Kepala BKN,  
ANRI, kemudian  
Ombudsman,**

**Ibu/Bapak sekalian yang kami hormati,**

Izinkan kami dalam kesempatan yang baik ini mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPR RI Komisi II atas upaya kita bersama dalam menjalankan tugas-tugas untuk melayani masyarakat lebih bagus.

Kami ingin sampaikan langsung saja evaluasi anggaran 2023.

Realisasi anggaran Kementerian PAN-RB tahun 2023 sebesar 98,63 atau bisa sebesar Rp315.957.346.038.558,00 dari pagu total Rp320.334.000.025,00. Dengan realisasi anggaran 98,63% tersebut

dibandingkan dengan target kinerja *outcome* atau sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2023, rata-rata capaian Kementerian PAN-RB di atas 100% atau 77 dari total target. Sementara, 23% dari total target tercapai antara 95-99%, sebagaimana yang dapat dilihat pada paparan kami.

**Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati,**

Realisasi anggaran untuk 2024 sampai dengan 8 September 2024 sebesar 68,7% atau sebesar Rp257.328.000.000,00 dan Rp951.935,00 dari pagu total Rp378.049.699.000,00.

Sehubungan dengan pelaksanaan anggaran tahun 2024, Kementerian PAN-RB telah melaksanakan beberapa program prioritas pemerintah berkaitan dengan pemerintahan digital. Pada 27 Mei 2024, Bapak Presiden Joko Widodo telah meresmikan *GovTech* Indonesia yang dinamakan INA Digital.

**Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati,**

Presiden telah mengumumkan kebutuhan ASN 2024 sejumlah 2,3 juta dan seterusnya, dan seterusnya. Kami langsung akan melompat ke halaman, apa namanya, 11, sebagaimana arahan Bapak Ketua tadi.

**Pak Ketua dan Seluruh Anggota yang kami hormati,**

Kami ingin sampaikan pagu anggaran tahun anggaran 2025 untuk mendukung pelaksanaan program kerja tersebut. Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN, maka bagian anggaran Kementerian PAN-RB mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp359.980.127.000,00. Alokasi pagu anggaran ini tidak mengalami perubahan dari alokasi pagu indikatif.

- Alokasi untuk program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN atau program teknis sebesar Rp108.895.320.000,00; dan
- Program dukungan manajemen, atau program dukungan, atau program Dukman sebesar Rp251.084.807.000,00.

Apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran sejak tahun 2022, anggaran Kementerian PAN-RB mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena adanya tambahan anggaran. Namun, pada tahun 2025:

- Untuk program teknis mengalami penurunan sebesar 38,02%; sementara untuk
- Untuk program Dukman mengalami kenaikan sebesar 24,8%.

Secara total pagu indikatif Kementerian PAN-RB 2025 mengalami penurunan sebesar 4,78%.

Mengingat tidak ada perubahan alokasi pada pagu anggaran, maka pengalokasian ke setiap unit kerja juga masih sama dengan pembagian pada pagu indikatif pengalokasian ini telah mempertimbangkan urgensi strategis dan kontribusi tiap unit kerja untuk mendukung kerja Kementerian.

**Pak Ketua,  
Para Anggota,  
Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati,**

Usulan tambahan anggaran Kementerian PAN-RB 2025.

Dalam merencanakan program kerja dan kegiatan tersebut, Kementerian PAN-RB telah menghitung anggaran yang dibutuhkan. Namun dengan ditetapkannya pagu anggaran yang belum mengakomodir usulan tambahan anggaran kami pada tahap pagu indikatif, maka saat ini Kementerian PAN-RB kembali mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp116.078.076.000,00 dengan rincian:

- Program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN sebesar Rp 68.027.880.000,00; dan
- Program dukungan manajemen sebesar Rp 48.050.196.000,00.

Sementara itu, untuk usulan tambahan anggaran pada program dukman akan mendukung penguatan kapabilitas organisasi Kementerian untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategi nasional di internal Kementerian, termasuk untuk operasional Kementerian.

Oleh karena itu, Kementerian Pan-RB mengharapkan dukungan dari segenap Pimpinan Komisi II DPR RI agar kiranya Kementerian PAN-RB diberikan kesempatan untuk mendapatkan tambahan alokasi anggaran sesuai dengan program kerja kami ini.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang terhormat,**

Demikian penjelasan kami terkait dengan rencana kerja dan anggaran RKA Kementerian PAN-RB Tahun 2025.

Sesungguhnya, ada program-program prioritas yang telah dikerjakan. Namun karena waktunya pendek, Pak Ketua, kami tidak sampaikan. Nanti tertulis saja kami serahkan.

Kami berharap dukungan dari segenap Pimpinan, Anggota Komisi II DPR RI untuk keberhasilan pencapaian program kerja kami guna mencapai agenda pembangunan 2025-2029.

Mengakhiri penjelasan kami, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama dan dukungan dari Pimpinan dan seluruh Anggota, segenap Anggota Komisi II DPR RI.

Begitu nikmat makan durian,  
Apalagi kalau perut keroncongan,  
Hari ini kita bahas anggaran,  
Semoga Bapak/Ibu Dewan memberikan dukungan,

Ada udang di balik batu,  
Udang direbus oleh Bu Maya,

Pemerintah bekerja tak kenal waktu,  
Demi kemajuan bangsa Indonesia,  
Bersama-sama DPR Komisi II,

Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.

*Wallahi muwafiq ila aqwamith thariq.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Buah anggur buah pisang,  
Buah jeruk buah pepaya,  
Itulah nama-nama buah.

Luar biasa *nih*, Pak Menteri ini. Banyak benar pantunnya.

Terima kasih, Saudara Menteri PAN-RB.

Selanjutnya, Saudara Plt. Kepala BKN.

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI (Drs. HARYOMO DWI  
PUTRANTO, M.Hum.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat siang,  
Salam sehat,  
Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Komisi II DPR RI,  
Yang terhormat Bapak Menteri PAN dan RB RI,  
Yang saya hormati Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara beserta  
jajaran,  
Yang saya hormati Plt. Kepala Arsip Nasional beserta jajaran,  
Yang saya hormati Ketua Ombudsman Republik Indonesia beserta  
jajaran,**

**Bapak/Ibu peserta rapat yang berbahagia,**

Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur Allah *Subhanahu wa taala*. Hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan, *insyaallah*, kebahagiaan untuk bisa menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI.



**Bapak Pimpinan yang saya hormati,**

Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan capaian anggaran dan rencana anggaran di tahun 2025. Saat ini, pagu anggaran BKN adalah sebesar Rp790.749.678.000,00 yang terdiri dari atas:

- Rp729.724.615.000,00 untuk program dukungan manajemen; dan sebesar
- Rp 61.007.063.000,00 untuk program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola Aparatur Sipil Negara.

Pagu tersebut masih terdapat *automatic adjustment* sebesar Rp5.910.929.000,00 atau kurang lebih 0,75% dari total pagu BKN.

Realisasi anggaran BKN tahun 2024 sampai dengan tanggal 9 September tahun 2024, berdasarkan aplikasi yang ada di Kementerian Keuangan, sebesar 70,2% atau sebesar Rp550.736.991.643,00 dengan:

- Realisasi anggaran pada program dukungan manajemen sebesar 70,92% atau sebesar Rp 517.513.479.734,00; dan
- Realisasi anggaran pada program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN sebesar 60,30% atau sebesar Rp33.223.511.909,00.

Capaian anggaran tersebut di luar anggaran *automatic adjustment* yang telah melebihi rata-rata capaian anggaran secara nasional, yaitu 56,65%.

**Bapak/Ibu yang kami hormati,**

Pada tahun 2024 tentu BKN telah melakukan beberapa percepatan transformasi digital yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

**Bapak/Ibu yang saya hormati,**

Pada tahun 2024, BKN mendapatkan amanat untuk melaksanakan empat kegiatan prioritas nasional. Yang pertama adalah prioritas penataan atau penilaian potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan tahun 2023 yang dilakukan menggunakan aplikasi *computer assisted competency test* atau CACT dengan target 60.000 Aparatur Sipil Negara dan pagu anggaran sebesar Rp5.500.000.000,00. Yang terdiri dari:

- 40.000 ASN dari instansi pusat yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara; dan
- 20.000 ASN dari instansi penyangga IKN.

Sampai dengan tanggal 9 September 2024 telah dilakukan penyertaan, penilaian potensi, dan kompetensi pada 43.000 ASN setara dengan 71,7% dengan capaian anggaran sebesar 50,41%.

Yang kedua, BKN juga telah melakukan penyusunan standar penilaian potensi dan kompetensi ASN dengan target 1 NSPK dan pagu anggaran sebesar 2 Miliar. Pada prioritas ini, BKN akan mengembangkan sebuah alat ukur berbasis digital dengan target asesinya adalah para pejabat pimpinan tinggi. Kegiatan ini akan dilakukan secara *virtual assessment center* yang dimulai dari kegiatan penyusunan simulasi, kemudian pelaksanaan penilaian kompetensi baik secara luring maupun daring.

Kemudian, anggaran yang sampai pada hari ini tanggal 9 September progres capaian *output*-nya sebesar 40% dengan capaian anggaran sebesar 42,2%.

Ketiga, penyusunan rekomendasi kebijakan tentang sistem penggajian pegawai Aparatur Sipil Negara pada instansi pemerintah dengan target satu rekomendasi kebijakan dan pagu anggaran sebesar Rp1 miliar. Sampai dengan tanggal 9 September 2024, progres capaian *output* sebesar 73% dengan capaian anggaran 71%.

Yang keempat, layanan data ASN terintegrasi dengan target satu layanan dan pagu anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00. BKN, melalui Direktorat pengolahan data dan penyajian sistem informasi, akan menjalankan program prioritas nasional ini untuk mewujudkan layanan data dan informasi ASN yang terintegrasi, serta memiliki data akurat terkini dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Bapak Pimpinan yang saya hormati,**

Sampai dengan tanggal 9 September tahun 2024, program capaian *output* sebesar 50% dari capaian anggaran sebesar 22,4%.

Selain melakukan percepatan transformasi digital dalam upaya memenuhi kebutuhan data talenta untuk menciptakan manajemen talenta ASN, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, BKN juga melakukan strategi percepatan pembangunan manajemen talenta melalui transformasi layanan penilaian kompetensi. Transformasi tersebut berupa:

- penyelenggaraan penilaian kompetensi secara penerapan teknologi di dalamnya; dan
- pembinaan penyelenggaraan kompetensi yaitu, akreditasi lembaga penilaian kompetensi.

Saat ini telah terbit pagu anggaran berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Bappenas Nomor 612 Tahun 2024 dan Nomor 480 Tahun 2024 tanggal 19 Juli 2024, BKN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp798.342.991.000,00.

Berdasarkan redesain sistem perencanaan dan penganggaran, rencana kerja BKN memiliki dua program, yaitu:

- Dukungan manajemen; dan

- Program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola Aparatur Sipil Negara.

Untuk program dukungan manajemen alokasi anggarannya adalah sebesar Rp732.914.355.000,00. Dari program tersebut:

- Sebesar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua belas, Rp593.112.857.000,00 dialokasikan untuk belanja operasional yaitu, belanja pegawai dan pemeliharaan perkantoran; serta
- Sembilan, Rp193.801.498.000,00 untuk belanja non-operasional yang terdiri dari:
  - o Rp117.775.271.000,00 bersumber dari rupiah murni yang direncanakan untuk belanja barang dan belanja modal; kemudian
  - o Sebesar Rp 73.379.798.000,00 yang bersumber dari surat berharga syariah negara atau SBSN yang akan direncanakan untuk pembangunan dua UPT yang ada di Jambi dan Pangkal Pinang setelah izin prinsip diterbitkan.  
Dengan adanya hal tersebut, maka akan mendorong BKN untuk meningkatkan dan meningkatkan khususnya di bidang kepegawaian dan masyarakat; selanjutnya
  - o Sebesar Rp 2.646.429.000,00 bersumber dari PNBPN yang direncanakan untuk pemberian sarana dan prasarana penunjang seleksi pada unit penghasilan dan PNBPN.

Sedangkan, untuk program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN alokasi anggarannya adalah Rp65.428.636.000,00. Dari pagu tersebut, BKN mendapatkan alokasi anggaran:

- Sebesar lima puluh empat juta, lima puluh empat miliar, mohon maaf, Rp54.724.729.000,00 yang bersumber dari rupiah murni; dan
- Sebesar Rp10.703.907.000,00 yang bersumber dari PNBPN.

#### **Bapak/Ibu yang saya hormati,**

Pada lingkup Sekretariat utama dan Inspektorat kami juga menghabiskan anggaran sebesar Rp447.632.227.000,00. Alokasi tersebut digunakan untuk mendukung program kerja BKN dalam rangka pengelolaan keuangan, BMN, serta pengawasan internal.

Pada lingkup ke deputian manajemen ASN, maka anggaran dialokasikan sebesar Rp4.835.000.000,00. Anggaran ini digunakan untuk mendukung program kerja BKN dalam rangka penguatan pembinaan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Sedangkan pada lingkup ke deputian penyelenggaraan layanan manajemen ASN, kami me-aksikan anggaran sebesar Rp3.005.000.000,00, alokasi tersebut digunakan untuk mendukung program kerja BKN dalam rangka peningkatan penyelenggaraan layanan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Dan yang terakhir untuk bidang pengawasan dan pengendalian, kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp14.305.011.000,00. Alokasi ini

digunakan untuk mendukung program kerja BKN dalam rangka pelaksanaan pengawasan manajemen ASN, termasuk pengawasan sistem merit.

Untuk kedeputan SINKA, kita menganggarkan sebanyak Rp60.875.770.000,00.

Pada lingkup pusat-pusat, kita juga menganggarkan sebanyak lima, Rp16.224.010.000,00 dalam rangka pemenuhan data manajemen talenta melalui transformasi layanan penilaian kompetensi.

Sedangkan, pada lingkup satuan kerja yang ada di pusat maupun yang ada di kantor regional untuk pusat pengembangan kepegawaian ASN, sampai dan kantor regional I sampai dengan XIV, kita menganggarkan sebesar Rp251.465.973.000,00.

Selanjutnya untuk belanja rutin, berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2025, BKN mendapatkan amanat untuk melaksanakan tiga program prioritas nasional:

1. Yang pertama adalah penyusunan rekomendasi kebijakan *roadmap* penerapan sistem pensiun. Dengan target rekomendasi, satu kebijakan dengan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00; kemudian
2. Yang kedua, *database profile* ASN dengan target satu layanan. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.350.000.000,00; dan
3. Yang ketiga, pengawasan dan pemberian rekomendasi penindakan atas pelanggaran penerapan prinsip-prinsip sistem merit. Dengan target 100 rekomendasi dengan anggaran 2 miliar.

**Bapak/Ibu yang saya hormati,**

Pada forum yang terhormat ini, BKN mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp100 miliar. Kebutuhan tambahan anggaran ini digunakan untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana, baik di kantor pusat, 14 kantor regional dan 21 UPT di seluruh wilayah kerja BKN dalam rangka peningkatan pelayanan kepegawaian dan penguatan penyelenggaraan manajemen ASN.

Tambahan anggaran tersebut akan kami gunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin, yaitu:

- Pembelian genset pada kantor regional dan, 14 pada BKN pusat dan 14 kantor regional sebesar Rp16.762.140.000,00; kemudian untuk selanjutnya
- Pematangan lahan dan pembuatan pagar tanah hibah yang akan direncanakan untuk pembangunan UPT di Banjarbaru dan Ambon sebesar Rp6 miliar; serta
- Peremajaan listrik dan LAN pada 11 kantor regional, yaitu di beberapa kantor yang selama ini memang harus dilakukan peremajaan jaringan.

Demikian Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf.

*Billahi taufik wal hidayah.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

*Waalaiikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih, Saudara Plt. Kepala BKN. Agak panjang.

Selanjutnya, kami persilakan Plt. Kepala LAN. Singkat saja.

**Plt. KETUA LEMBAGA ADMINIDTRASI NEGARA RI (Dr. MUHAMMAD  
TAUFIQ, DEA.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera kita semuanya,

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II,  
Yang saya hormati Bapak Menpan-RB beserta jajaran,  
Yang saya hormati Bapak Plt Kepala BKN beserta jajaran,  
Yang saya hormati Plt Kepala ANRI beserta jajaran, dan  
Yang saya hormati Ketua ORI beserta jajaran,**

Sesuai dengan Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara LAN memiliki kewenangan melakukan rumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, serta penyelenggaraan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan untuk pengembang kompetensi ASN. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, beberapa kinerja perubahan yang telah dicapai adalah telah dilakukan transformasi pengembangan kompetensi ASN melalui transformasi kebijakan dari diklat menjadi pengembangan kompetensi terintegrasi, ya, dengan mengoptimalkan teknologi digital.

Yang kedua adalah mendorong transformasi pelayanan publik melalui akselerasi, inovasi bersama Kemenpan-RB dan Kementerian Dalam Negeri untuk terus serta meningkatkan indeks inovasi daerah dan indeks pelayanan publik sejak 2015.

Pagu, adapun progres pelaksanaan anggaran tahun 2024, kami laporkan pagu anggaran LAN tahun 2024 adalah sebesar Rp321.861.735.000,00 yang bersumber dari:

- rupiah murni; dan
- penerimaan negara bukan pajak.

Dari pagu tersebut dialokasikan ke dalam dua program, yaitu:

- program dukungan manajemen; dan
- program kebijakan pemilihan profesi dan tata kelola ASN.

Dengan rincian komposisi pengalokasian anggaran per program dan sumber daya sebagai berikut:

- Untuk program dukungan manajemen total adalah Rp254.773.788.000,00; dan
- Program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN adalah sebesar Rp67.087.947.000,00.

Dalam kesempatan yang baik ini, kami laporkan pula bahwa sampai dengan 9 September 2024 realisasi anggaran mencapai 60% koma 49, *eh*, persen. Progres pelaksanaan kegiatan dari program kebijakan, pembinaan profesi dan tata kelola ASN adalah sebagai berikut:

1. Yang pertama, program kajian kebijakan administrasi negara ini telah dilakukan, fasilitasi laboratorium RB tematik di berbagai daerah dan instansi kementerian/lembaga; kemudian
2. Inovasi administrasi negara dan pengembangan kompetensi ASN ini telah disusun di direktori Inovasi Satu Sehat dengan pengguna 109 juta; kemudian
3. Pembinaan jabatan fungsional. Ini kita dorong untuk perubahan-perubahan kebijakan yang mendukung adaptasi para jabatan fungsional di era digital;
4. Yang keempat adalah kebijakan pengembangan kompetensi. Ini kita lakukan kebijakan-kebijakan pengembangan kompetensi terintegrasi dengan mendorong tadi optimalisasi teknologi digital;
5. Yang kelima adalah penjaminan dan, dan peningkatan mutu kualitas penyelenggaraan pelatihan ASN; serta
6. Peningkatan kapasitas aparatur negara di mana telah dihasilkan 87.243 alumni pembelajaran secara virtual dan terlaksananya penyelenggaraan ASN talenta akademi ya dengan jumlah 380, *eh*, 13 peserta dan didukung 316 korporasi.

Untuk pagu anggaran LAN tahun 2025, kami laporkan, pagu anggaran tahun, LAN, 2025 berdasarkan Surat Bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Kepala Bappenas tentang Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp315.388.668.000,00. Dibandingkan dengan pagu tahun 2024, terjadi kenaikan pagu sebesar Rp3.111.533.000,00 atau sebesar 1%.

Komposisi pagu anggaran LAN 2025 adalah sebagai berikut:

- Untuk dukungan manajemen Rp258.198.536.000,00;
- Untuk kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN adalah Rp 57.190.132.000,00.

Pengalokasian anggaran lebih lanjut ke dalam kegiatan-kegiatan dilakukan dengan mengacu rencana kerja pemerintah 2025. Dari hasil pertemuan tiga pihak antara LAN, Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan, telah disepakati adanya prioritas nasional:

1. Yang pertama adalah *piloting* pengembangan kompetensi tematik di daerah lambat tumbuh;

2. Yang kedua adalah rencana pengembangan kompetensi nasional sesuai dengan tujuan pembangunan nasional; dan
3. Yang ketiga adalah penyelenggaraan ASN *Talent Academy*.

Dengan total, Rp2.500.000.000,00.

Sebagaimana gambaran terinci dari *output* prioritas nasional tersebut adalah:

1. Yang pertama, untuk *piloting* pengembangan kompetensi tematik di daerah lambat tumbuh ini kita harapkan ada kebijakan percepatan pengembangan kompetensi di daerah-daerah yang 3T; kemudian
2. Yang kedua adalah rencana pengembangan kompetensi nasional sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam rangka merancang kompetensi yang mampu mendukung RPJMN 2024-2029, 2025-2029; serta
3. ASN *Talent Academy* untuk menyiapkan *future leader* ya, dan ini didukung oleh 316 korporasi. Jadi, mereka akan magang di korporasi.

Selain kegiatan yang bersifat prioritas nasional, pagu anggaran LAN tahun 2025 juga direncanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAN sebagaimana berikut, yaitu:

- Untuk pembayaran gaji, tunjangan kinerja bagi 1.009 pegawai;
- Operasional pemeliharaan kantor pada 8 lokasi kantor LAN;
- Peningkatan Sarpras aparatur LAN pada 8 lokasi kantor LAN; dan
- Non-operasional lain pendukung tugas dan fungsi.

Untuk kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN, alokasi anggaran akan dilakukan untuk:

- Analisis kebijakan dan isu strategis di bidang administrasi negara;
- Pembinaan jabatan fungsional administrasi negara;
- Kebijakan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN; serta
- Penyelenggaraan pendidikan terapan pada tiga politeknik STIA LAN.

Usulan tambahan untuk anggaran tahun 2025.

### **Pimpinan dan Anggota Komisi II yang terhormat,**

Perkenankan kami dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan kembali harapan adanya tambahan anggaran tahun 2025 sebagai berikut:

1. Yang pertama adalah teknologi informasi pembelajaran ASN. Sejalan dengan transformasi digital, ini kita harapkan kita mampu memperkuat infrastruktur, ya, untuk pembelajaran bagi lebih dari 4 juta ASN;
2. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi ASN. Dalam hal ini adalah dilakukan untuk mendukung transformasi para jabatan fungsional binaan Lembaga Administrasi Negara dengan teknologi-teknologi terkini, ya, sesuai dengan transformasi dalam kebijakan kompetensi ASN; dan

3. Yang ketiga adalah sarana prasarana pembelajaran. Ini yang kita harapkan nanti mendukung tugas fungsi LAN dalam hal nanti perbaikan sarana prasarana pembelajaran di 8 satker LAN. Nah, kondisi sarana-prasarana tersebut memang sudah sangat urgen untuk diperbaiki.

Dari pagu anggaran yang tersedia, LAN belum dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk memenuhi keputusan di atas. Sehingga, pada kesempatan yang baik ini LAN mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2025 dengan total sebesar Rp121.887.232.253,00.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang terhormat,**

Demikian hal yang dapat kami laporkan pada Rapat Dengar Pendapat yang baik ini dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih setulusnya. Selama lima tahun ini, Komisi II telah mendukung, membimbing Lembaga Administrasi Negara sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, Pimpinan dan Anggota Komisi II yang terhormat, sekali lagi kami ucapkan terima kasih.

*Billahi taufik wal hidayah.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

*Walaikumsalam warahmatullahi.*

Terima kasih, Saudara Kepala LAN.

Selanjutnya, kami persilakan Kepala ANRI.

**Pit. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Drs. IMAM  
GUNARTO, M.HUM.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Selamat siang,  
Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,  
Yang terhormat Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi beserta jajaran,**



**Yang saya hormati Kepala BKN beserta jajaran,  
Kepala LAN beserta jajaran,  
Ketua Ombudsman beserta jajaran, dan  
Hadirin yang berbahagia,**

Perkenankanlah kami dari ANRI *menghaturkan* terima kasih atas undangan rapat kerja hari ini, serta dukungan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II DPR RI kepada ANRI selama ini.

Pada kesempatan rapat kerja ini, izinkan kami menyampaikan tentang penyesuaian rencana kerja dan anggaran ANRI tahun anggaran 2025. Dan setelah itu, kami akan sampaikan pula evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024.

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Menteri Keuangan dan Menteri PPN, ANRI mendapat pagu anggaran sebesar Rp251.995.636.000,00. Pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung dua program, yaitu:

- Program penyelenggaraan kearsipan sebesar Rp46.544.853.000,00 atau sebanyak 18%; serta
- Program dukungan manajemen sebesar Rp205.450.783.000,00 atau 83%.

Sesuai dengan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat tanggal 2 September 2024, serta berdasarkan hasil *trilateral meeting* Rencana Kerja ANRI Tahun 2025 antara ANRI, Bappenas, dan Kementerian Keuangan pada tanggal 26 Juni 2024 telah disepakati adanya pergeseran anggaran antar program, yaitu:

- Pergeseran antar program yang semula pada program dukungan manajemen sebesar Rp205.450.783.000,00 menjadi Rp201.825.697.000,00 atau berkurang sebesar Rp 3.625.086.000,00;
- Anggaran tersebut yang kemudian bergeser ke program penyelenggaraan kearsipan nasional yang semula sebesar Rp46.544.853.000,00 bertambah menjadi Rp50.169.939.000,00.

Pergeseran tersebut tidak mempengaruhi jumlah pagu anggaran ANRI tahun 2025. Dengan demikian, alokasi anggaran ANRI pada tahun 2025 berdasarkan jenis belanja menjadi sebagai berikut. Berdasarkan program, yaitu:

- Program penyelenggaraan kearsipan nasional menjadi sebesar Rp50.169.939.000,00 atau 20%; dan
- Program dukungan manajemen menjadi sebesar Rp201.825.000.697,00 atau 80%.

Berdasarkan jenis belanja, ANRI mengalokasikan untuk belanja operasional sebesar Rp179.765.185.000,00 atau 71% yang digunakan untuk mendanai sebagian besar untuk:

- Belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp125.824.630.000,00;
- Belanja operasional barang untuk pemeliharaan perkantoran dan lain-lain sebesar Rp50.940.555.000,00; serta
- Belanja non-operasional sebesar Rp72.230.451.000,00 atau 29%.

Berdasarkan sumber pendanaan dari:

- Rupiah murni sebesar Rp236.251.933.000,00 atau 94%; sedangkan
- Sumber dana PNBP sebesar Rp15.743.703.000,00 atau 6%.

Berdasarkan kegiatan prioritas, ANRI mengalokasikan Rp10.911.474.000,00 atau 4% dari total pagu anggaran sebagai belanja untuk kegiatan prioritas.

Kegiatan prioritas yang dialokasikan sebesar 10 Miliar tersebut digunakan untuk:

- Kegiatan informasi arsip yang tersedia di JKN peningkatan kapasitasnya sebanyak Rp1.880.191.000,00; juga kemudian
- Untuk proses penetapan *memory* di bangsa sebesar 1 miliar lebih;

Mohon maaf.

- Untuk pengawasan kearsipan 2,5 miliar; dan
- Untuk digitalisasi arsip terjaga dan arsip statis sebanyak 5,5 miliar.

Berdasarkan anggaran ANRI tahun 2025, terdapat kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat, yaitu:

- Layanan restorasi arsip keluarga yang merupakan program ANRI untuk memberikan layanan secara langsung kepada masyarakat melalui digitalisasi restorasi arsip keluarga dan sebagainya; kemudian
- Layanan arsip statis atau Larisa kepada masyarakat; dan
- Layanan informasi kearsipan melalui aplikasi Srikandi, SIKNJKN, *website* ANRI, *website* MKB, MOW dan *website* sejarah nusantara.

**Bapak/Ibu yang saya hormati,  
Bapak Pimpinan,**

Memperhatikan pagu ANRI yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 dan terutama untuk kebutuhan transformasi kearsipan, maka kami mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp239.366.284.000,00 untuk membiayai enam kegiatan.

- Yang pertama adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengokohan ketahanan budaya nasional melalui penyelamatan arsip kemaritiman sebesar Rp21.123.080.000,00;
- Yang kedua, terkait dengan digitalisasi arsip tentang Papua sebesar Rp10 miliar; kemudian
- Yang ketiga terkait dengan layanan preservasi arsip kepada masyarakat sebesar Rp21 miliar
- Yang keempat, untuk percepatan penyelamatan arsip pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini sebesar Rp5.706.000.467,00; dan
- Yang kelima revitalisasi sarana dan prasarana preservasi arsip sebesar Rp61.219.000.587,00; dan
- Yang penting juga adalah pembangunan pusat khazanah arsip nusantara sebesar Rp120.370.150.000,00 yang sedianya untuk:

- pengembangan pembangunan pusat khazanah arsip nusantara di provinsi Riau;
- revitalisasi diorama perjalanan bangsa yang sudah dibangun sejak 2009;
- modernisasi peralatan dan fasilitas layanan arsip statis.

Kami sangat berharap usulan anggaran biaya tambahan ini dapat mendapat persetujuan dari Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

**Bapak/Ibu yang saya hormati,**

Pada tahun 2024 anggaran ANRI berjumlah Rp283.568.272.000,00. Kemudian, akibat pemotongan *automatic adjustment* biaya yang dikelola atau anggaran yang dikelola menjadi Rp262.241.398.000,00.

Kemudian terhadap kebijakan yang menggembirakan, yaitu adanya relaksasi penggunaan anggaran yang di potong melalui skema *automatic adjustment* pada tanggal 3 September 2024. Menteri Keuangan Republik Indonesia menyetujui relaksasi anggaran ANRI bertambah menjadi Rp18.416.265.000,00.

Dapat kami laporkan bahwa sampai periode 6 September 2024 realisasi anggaran ANRI yang terserap sebanyak Rp201.210.010.572,00 atau 70,96%.

Saya kira demikian yang kami sampaikan. Kami mohon perkenan Pimpinan dan Seluruh Anggota Komisi II yang saya muliakan untuk terus mendukung upaya pembangunan kearsipan untuk menjamin akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan melestarikan memori dan identitas bangsa bagi kita semua. Saya kira demikian.

Yang terakhir dalam kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan mohon pamit karena *open bidding* Kepala ANRI sudah ditentukan dan nanti akan ada Kepala yang baru. Mohon pamit mohon maaf apabila selama ini ada kekurangan kesalahan kami secara pribadi. Dan mohon dukungan terus kepada Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

Mohon maaf.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

*Walaikumsalam warahmatullahi.*

Eggak ikut lagi, Pak?

**PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Drs. IMAM GUNARTO, M.HUM.):**

Enggak, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

*Oh.* Enggak, ya.

Terima kasih, Saudara Kepala ANRI.

Selanjutnya, kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

**KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (MOHAMMAD NAJIH, S.H., M.Hum., Ph.D.):**

Terima kasih kesempatannya.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang saya hormati Bapak-Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Yang kami hormati Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajaran, Yang saya hormati Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, serta jajaran, Yang saya hormati Kepala Lembaga Administrasi Negara beserta jajaran, Yang saya hormati Kepala Plt. Kepala Arsip Nasional beserta jajaran, dan Hadirin yang berbahagia,**

Marilah kita senantiasa syukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, pada hari ini kita bisa hadir dalam memenuhi undangan Komisi II dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR.

Selanjutnya, kami juga ingin menyampaikan terima kasih atas segala dukungan dan kerja sama yang telah diberikan selama ini dari Komisi II bersama Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka memenuhi tugas-tugas konstitusional kita.

**Bapak Pimpinan yang saya hormati,**

Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023, tahun 2024, dan juga penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2025.

Untuk evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025, pagu alokasi anggaran Ombudsman tahun 2023 sebesar Rp248.327.920.000,00. Namun, terdapat kebijakan *automatic adjustment* dalam angka Rp8.754.271.000,00. Sehingga, pagu anggaran menjadi Rp239.573.649.000,00.

Ombudsman berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 94,98% atau sebesar Rp227.552.664.570,00.

Pada tahun 2023, Ombudsman RI telah melakukan berbagai capaian kinerja di antaranya adalah penyelesaian laporan masyarakat sebanyak 7.990 laporan masyarakat.

Kemudian, untuk pencegahan maladministrasi, terutama dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik terhadap kementerian/lembaga, pemerintah daerah penyelenggara layanan publik. Bahwa tahun 2023 telah menilai sebanyak 586 entitas secara nasional yang menunjukkan peningkatan sangat baik. Ini terlihat dari jumlah K/L/D yang berada di zona hijau yang meningkat. Sebesar 46,42% pada tahun 2022 menjadi 70,70% pada tahun 2023. Pada zona kuning dan zona merah terjadi penurunan. Masing-masing 42,66% dan 10,92% pada tahun 2022 menjadi 22,66% dan 6,64% pada tahun 2023.

Sedangkan, beberapa capaian program dukungan manajemen, mulai dari:

- kearsipan Ombudsman;
- keterbukaan informasi publik;
- jaringan dukungan dan informasi;
- indeks maturitas;
- indeks sistem merit;
- opini BPK;
- digital *government* SPBE *summit*; dan
- reformasi birokrasi.

Semua mengalami peningkatan dan perbaikan.

Adapun realisasi untuk anggaran tahun 2024, pagu alokasi anggaran sebesar Rp248.841.107.000,00. Dengan *automatic adjustment* sebesar lima belas koma, Rp15.174.970.000,00. Sehingga, pagu efektif menjadi sebesar Rp233.666.137.000,00.

Realisasi anggaran sampai dengan 6 September sebesar Rp150.335.796.862,00 atau sebesar 64,34%. Dengan *output* penyelesaian laporan sebesar, sebanyak:

- seribu, *eh*, 16.093 laporan masyarakat yang-yang selesai diproses; dan
- 2.822 dalam proses.

Sedangkan untuk pencegahan maladministrasi, survei kepatuhan masih proses pengumpulan data sampai dengan bulan Oktober. Sehingga, belum kami laporkan terhadap 572 K/L/D yang kita lakukan survei.

Adapun rencana kerja Ombudsman tahun 2025 disusun berpedoman kepada RKP tahun 2025 dalam rangka mendukung RPJMN tahun 2025-2029. Pada RKP tahun 2025, Ombudsman mendukung prioritas nasional yang ketujuh, yaitu memperkuat reformasi politik hukum birokrasi serta memperkuat

pengecahan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Program prioritas reformasi tata kelola pemerintahan, khususnya pada kegiatan prioritas penguatan manajemen kinerja pembangunan.

Indikator keberhasilan kegiatan-kegiatan prioritas ini dapat diukur salah satunya adalah melalui persentase K/L/D yang mendapatkan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dengan kualitas tertinggi.

Dengan rencana kerja pada tahun 2025, terdapat enam rincian *output* prioritas nasional, yaitu:

- opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik kementerian dan lembaga;
- opini pengawasan penyelenggaraan publik pemerintahan daerah;
- laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan di pusat; dan
- laporan penyelesaian masyarakat yang diselesaikan di perwakilan; kemudian yang berikutnya adalah
- laporan investigasi atas prakarsa sendiri, baik di pusat dan di perwakilan.

#### **Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,**

Perlu kami sampaikan bahwa Ombudsman RI dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dalam mendukung prioritas nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2025 untuk lebih jelasnya dapat dilihat di dalam *slide*.

Bahwa pagu anggaran tahun 2025, berdasarkan Surat Menteri Keuangan dan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor S-621 dan Nomor B-480, tanggal 19 Juli tahun 2024, bahwa Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Alokasi Khusus Tahun 2025. Bahwa pagu anggaran tahun 2025 Ombudsman RI adalah sebesar Rp232.211.019.000,00 sama dengan pagu indikatif.

Berdasarkan pagu anggaran dapat kami sampaikan bahwa:

- Program pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sebesar Rp44.882.000.000,00; sedangkan
- Program dukungan manajemen sebesar Rp187.329.019.000,00. Yang terdiri dari:
  - o belanja operasional, sedangkan belanja operasional sebesar Rp 187.329.019.000,00; dengan
  - o belanja non-operasional sebesar Rp0,00.

Pada program pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, alokasi pagu anggaran per-kegiatan telah dialokasikan. Namun pada program dukungan manajemen, pagu anggaran kegiatan hanya tersedia untuk belanja pegawai, perlengkapan, dan kerumahtanggaan. Sedangkan, belanja non-operasional yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan di kesekjenan dan 34 perwakilan belum tersedia atau Rp0,00.

Sedangkan, kegiatan yang belum tersedia di antaranya adalah pada:

- aspek perencanaan dan keuangan;
- fasilitasi pelayanan teknis pengawasan pelayanan publik;
- kehumasan, data dan sistem, teknologi informasi;
- pengawasan internal hukum kerja sama, dan organisasi, dan reformasi birokrasi.

Di mana gambaran ataupun potret pagu Ombudsman terdapat di dalam tabel yang tertera di dalam *slide*. Bahwa pagu anggaran tahun 2025 mengalami penurunan dibanding pagu anggaran tahun 2024. Namun, pada program pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik mengalami penyesuaian terkait target prioritas nasional.

Pagu program dukungan manajemen pada tahun anggaran 2025 mengalami penurunan signifikan lebih rendah dari pagu tahun 2024. Pagu operasional program dukungan manajemen pada pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp187.329.019.000,00. Lebih rendah dibanding pada tahun 2024 sebesar 198 miliar dan seterusnya.

Sebagai informasi, bahwa penurunan tersebut pada:

- gaji pegawai dan pemeliharaan sarana dan prasarana pusat dan perwakilan; dan
- pagu non-operasional program dukungan manajemen tidak tersedia pada tahun anggaran 2025.

Adapun rincian kerja sesuai pagu anggaran tahun 2025. Sebagaimana tertera di dalam *slide* bahwa program pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi:

- penyelesaian laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat; kemudian
- jaringan pengawasan pelayanan publik;
- akses pengaduan pelayanan publik;
- laporan investigasi atas prakarsa sendiri;

Kemudian, pencegahan maladministrasi meliputi:

- sarana perbaikan kebijakan pelayanan publik;
- laporan pengawasan efektivitas tata kelola SP4N Lapor;
- kelompok masyarakat peduli administrasi;
- penyelenggaraan pelayanan publik bagi kelompok marginal dan bagi masyarakat daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; kemudian
- manajemen pengetahuan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

Sedangkan, untuk manajemen mutu juga meliputi aspek-aspek:

- aduan terkait kinerja pengawasan;
- unit kerja yang melakukan penjaminan mutu penyelesaian laporan;
- unit kerja yang melakukan penjaminan mutu terkait pencegahan mal administrasi; dan
- predikat penilaian mutu pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

Sedangkan, yang belum ada anggarannya adalah terkait dengan:

- program dukungan manajemen di perencanaan dan keuangan meliputi tiga kegiatan, sebagaimana ada di dalam *slide*;
- administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan layanan umum; kemudian
- kehumasan, dan data, sistem teknologi informasi; kemudian
- pengawasan internal;
- hukum, kerja sama organisasi, dan reformasi birokrasi; kemudian
- sumber daya manusia kelengkapan dan kerumahtanggaan layanan barang milik negara. Yang itu banyak juga aspek yang dilayani.

Kemudian karena itu, maka di dalam kesempatan ini izinkan kami, Bapak Pimpinan yang terhormat, untuk mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2025.

Bahwa besaran pagu anggaran Ombudsman tahun 2025 sebesar Rp232.211.019.000,00 belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kebutuhan operasional.

Kebutuhan anggaran Ombudsman tahun 2025 adalah sebesar Rp433.939.234.000,00. Sementara, besaran pagu anggaran adalah sebesar Rp232.211.019.000,00 dan masih terdapat kekurangan sebesar Rp201.728.215.000,00. Sehingga, diusulkan untuk tambahan anggaran operasi sesuai dengan usulan pada Rapat Dengar Pendapat pada sebelumnya, yaitu pada tanggal 2 September tahun 2024 dan telah disetujui oleh Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II.

Adapun rincian tambahan anggaran tahun 2025 meliputi sebesar Rp7.280.090.000,00 untuk-untuk kaitannya dengan:

- jaringan pengawasan pelayanan publik;
- untuk rincian *output* baru terkait opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di BUMN dan BUMD; kemudian
- predikat penilaian mutu pengawasan pelayanan publik di lingkungan Ombudsman sebagai upaya yang strategis untuk mengakselerasi capaian hasil dan sistem manajemen mutu terpadu di Ombudsman.

Kemudian, penambahan target 150 lokasi untuk kegiatan akses pengaduan pelayanan publik sebesar Rp23.860.000.000,00. Sedangkan, anggaran berikutnya sebesar Rp79.421.961.000,00 dialokasikan untuk kegiatan dukungan di kesekjenan yang saat ini masih belum tersedia anggarannya atau Rp0,00.

Usulan tambahan anggaran digunakan untuk menggaji pegawai sebesar Rp55.327.864.000,00. Dan digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana kantor pusat dan 34 perwakilan sebesar Rp35.838.300.000,00. Dan termasuk, ini digunakan rencana pengembangan empat perwakilan baru di Provinsi Papua. Pengembangan provinsi Papua.



**Pimpinan dan Anggota Komisi II Republik Indonesia yang kami hormati,**

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan.

Tentu kami terus ingin mendapat dukungan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI sebagai bentuk dari kemitraan bersama dan Ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik. Tentu, akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya lebih baik lagi jika mendapat dukungan yang lebih optimal.

Besar harapan kami melalui rapat pertemuan ini permintaan *urgensi* penambahan alokasi anggaran tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan usulan yang kami sampaikan.

Sekali lagi, terima kasih atas kerja sama yang selama ini telah berlangsung kurang lebih dari 4-5 tahun ini. Semoga sinergi kerja sama yang telah kita laksanakan bersama menjadi bentuk amal jariah, amal baik, yang kita gunakan untuk pengabdian terbaik bagi nusa bangsa dan negara.

Demikian.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

*Walaikumsalam warahmatullahi.*

Sudah lewat 12.30, panjang-panjang.

Terima kasih, Pak Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Saudara Menteri, terus masing-masing Kepala dan Ketua Lembaga.

Oh, masih ada ya?

**F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Eh, ada Pak Gaus.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

Oh, Pak Gaus. Sudah terpilih, Pak? Belum?

**F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Sudah terpilih kayaknya.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

Oh, iya.

Silakan, Pak Syamsurizal, Pak Kamran, Pak Gaus dan Pak Riyanta.

Jangan lama-lama, Pak. Jam 13.00, kita ada rapat lagi.

Silakan, Pak Syamsurizal.

**F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Terima kasih, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

*Sorry,*

Fokus masalah anggaran, ya.

**F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Terima kasih.

**Pak Ketua, dan  
Pak Menteri, serta  
Seluruh jajaran yang hadir dari LAN,  
Dari ANRI,  
Dari Ombudsman, dan  
Semua Anggota yang hadir saat ini,**

Saya sedikit saja ingin mengingatkan bahwasanya dalam konteks pembahasan APBN seperti ini untuk tahun 2025. Tentu, saya yakin ini sudah disesuaikan dengan kebijakan nasional, kebijakan ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang baru saja disampaikan oleh Menteri Keuangan baru-baru ini di Rapat Paripurna kita.

Penyusunan ini pasti tidak akan dapat dilepaskan dari dinamika dan yang kita sebut dengan prospek ekonomi global. Dan apa yang terjadi? Kalau kita lihat prospek ekonomi global ini, Indonesia tidak akan bisa lepas dari konteks ekonomi global. Apa yang mewarnai ekonomi global kita saat ini?

Perang di mana-mana. Perang di antara Israel saja melibatkan beberapa negara dan itu mereka tidak sedikit yang juga adalah perusahaan minyak kita. Minyak dunia, mereka pusatnya. Termasuk juga di dalamnya adalah Iran, kemudian seperti Arab Saudi, Israel. Dan mereka yang berperang saat ini,

seperti juga Yaman itu, sudah berada pada posisi bangkrut. Israel sendiri itu tidak kurang dari sudah mengeluarkan dana perangnya satu *kuadran* atau Rp1.000 triliun yang sudah keluar. Dan mereka sudah mengatakan bangkrut, tapi mau mundur enggak bisa. Begitu juga dengan negara-negara-negara lain.

*Nah*, inilah yang mewarnai ekonomi global yang tidak akan sedikit berpengaruh pada tahun 2025, terhadap ekonomi lokal kita. Dan ini, apa yang kami maksudkan, kita harus berhati-hati akan terjadi inflasi yang cukup tinggi diperkirakan, menurut pengamat tahun 2025.

*Nah*, oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kepada kita semua terutama dari Kemenpan yang dananya besar, Ombudsman, kemudian BKN, LAN, dan ANRI terhadap peluang-peluang akan terjadinya atau potensi akan terjadinya inflasi yang cukup tinggi tersebut.

*Nah*, langkahnya bagaimana? Apa yang akan kita perbuat menghadapi inflasi yang bakal tinggi tahun 2025 tersebut? Tentunya, ini berlaku untuk kita semua.

Pertama, kami menyarankan untuk kita mempercepat selagi itu bisa dibelanjakan. Dipercepat belanjanya agar program kita, bisa kita wujudkan. Kalau kita melambat-lambatkan, pas sampai inflasi pasti kita tidak akan bisa berbelanja kalau inflasinya cukup tinggi.

*Nah*, kemudian apa pun yang, apa, kita bisa mengirit. Tidak berarti memperlambat program, tapi untuk hal-hal pengeluaran yang tidak penting, barangkali ini perlu dijaga.

Barangkali, ini yang patut kita-kita hati-hati. Karena tidak mungkin, tidak mungkin potensi terjadinya kenaikan harga minyak di luar negeri. Yang jelas kita adalah termasuk negara pengimpor minyak yang cukup besar. Yang dikatakan Indonesia produsen minyak, minyak mentah yang kita hasilkan. Tapi, untuk minyak jadi kita adalah pengimpor yang paling terbesar.

Oleh karena itu, belanja kita itu akan dimakan oleh-oleh impor minyak kita yang cukup besar. Bisa juga kita juga pengimpor beras yang cukup besar dan ini akan berpengaruh kalau terjadi perang yang sangat meluas. Potensi peluang, yang peluang-peluang perang yang sangat meluas itu masih sangat besar. Karena masing-masing pihak, kita baca beritanya, tidak ada yang mau mengalah untuk berhenti berperang. Apalagi, mereka saling bantu-membantu.

Dan keterlibatan Amerika dan Eropa terhadap *Ukraine*, perang dengan Rusia, juga ini tidak bisa ditahan-tahan. Dan Rusia sendiri pun tidak mau kalah. Dia akan memberikan, menyampaikan perang besar juga terhadap Eropa dan Amerika.

Barangkali ini saja perhatian saya untuk Bapak/Ibu semua yang akan membelanjakan uang negara ini untuk rakyat. Dipercepat untuk penyampaian program ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

*Walaikumsalam warahmatullahi.*

Terima kasih, Pak Syamsurizal.

Pak Kamran.

**F-P.NASDEM (KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T.):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan seluruh Anggota DPR yang saya hormati,  
Pak Menteri dan seluruh mitra yang *alhamdulillah* boleh hadir pada siang  
hari ini,**

Saya hanya menyoroti masalah dukungan manajemen anggaran dari sisi dukungan manajemen. Ini kan kalau dari Menpan ini kurang lebih 251. BKN di atas 700-an. Substansi dukungan manajemen ini kan *money*, *monitoring* dan evaluasi. Ikutannya pembinaan, *outcome*-nya sikap mental.

*Nah*, apakah dukungan anggaran yang sebesar ini akan mengubah semua *problem* yang terkait dengan CPNS dan segala macam? Karena dari tahun ke tahun, dukungan anggaran tetap seperti ini. Tapi, perilaku dan tata cara, apa yang terjadi? Tetap mengemuka di dalam setiap, apa namanya, penerimaan.

*Nah*, tentu DPR ingin agar dukungan dana yang sebesar ini mestinya tidak ada lagi atau, paling tidak, kita akan melihat bahwa ada perubahan yang mendasar dari sisi penerimaan CPNS dan hari ini PPPK.

*Nah*, ini setiap tahun dukungannya di, apa namanya, ditambah. Tetapi, *problem*nya tidak pernah selesai dan kualitasnya malah lebih baik. *Problem* dari tahun ke tahun, kualitasnya lebih baik. Artinya, tingkat tata cara mengelabui segala-segala macam persoalan terkait dengan penerimaan itu lebih canggih. Itu artinya, ada peningkatan kualitas yang harusnya bukan itu yang kita inginkan.

*Nah*, oleh sebab itu, ini harus menjadi perhatian sungguh-sungguh dari Kementerian dan BKN agar apa yang menjadi, apa namanya, substansi daripada penambahan anggaran untuk dukungan manajemen ini benar-benar bermanfaat. Dalam rangka, kita mencari *outcome* dari semua proses dan tahapan dalam rangka penerimaan.

Kemudian, hal ini juga sama. Dengan LAN juga sama, dengan Ombudsman juga sama. Kalau dukungan dana untuk *monitoring*, evaluasi, dan pembinaan, mestinya diikuti dengan nilai-nilai yang menjadi kepentingan kita bersama.

Itu, Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

*Walaikumsalam warahmatullahi.*

Terima kasih, Pak Kamran.

Pak Gaus.

**F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang dihormati,  
Pak Menteri,  
Ketua Kepala Lembaga,  
Hadirin dan hadirat yang berbahagia,**

Hampir semua, bukan hampir. Semua kertas kerja ini saya telaah ketika Bapak-Bapak melakukan pemaparan. Dari lima kementerian dan lembaga yang kita melakukan pembahasan terhadap anggaran dan juga kita melakukan evaluasi, saya, berdasarkan kertas kerja yang Bapak/Ibu sampaikan ini, yang paling lengkap itu adalah Kementerian Menpan-RB, di mana, ini boleh dilihat. Jadi, saya kliping-kliping semua ini Pak. Saya coret-coret, saya kliping-kliping.

Barangkali, Ketua, ke depan tentu kita berharap bahwa pembahasan anggaran juga dimaksudkan dalam rangka mengevaluasi anggaran. Sekarang ini, kita membahas anggaran 2025. Kemudian, menyampaikan bagaimana realisasi anggaran 2024. Dan terakhir adalah tentu juga mengevaluasi pelaksanaan anggaran 2023.

Yang luar biasa itu adalah Kementerian Menpan-RB. Ini saya catat.

Kemudian, yang dalam pembahasan evaluasi itu disampaikan apa-apa saja sasaran itu. Pak Menteri menyampaikan ada enam sasaran itu

diungkapkan indikator-indikator dari masing-masing program dan kegiatan yang dilakukan itu. Ini yang benar.

Dari apa yang Pak Menteri sampaikan ini, semuanya capaiannya di atas 100% rata-rata. Nyaris ada malah yang mencapai angka itu, capaiannya 778%. Biasanya target kita itu kan 100%, ini malah 778. Itu tentu saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Halaman, *anu*-nya, 6, Pak Menteri.

Jadi, ketika bicara terwujudnya ASN yang profesional, di mana targetnya 7, capaiannya adalah 56. Skor yang disampaikan ini, tentu ini juga kalau kita bicara tentang perencanaan, mana yang benarnya? Apakah targetnya yang kurang, sengaja dibuat kecil? Sehingga, lompatan capaian ini selalu, tiap pembahasan anggaran ini, selalu saya sampaikan. Tapi, saya memberikan apresiasi. Kenapa? Rata-rata di atas 100%. 107, 101, 285%, dan lain sebagainya. Dan juga dijelaskan sasaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.

Lalu, juga disampaikan kepada kami tentang realisasi anggaran 2024 yang bapak-bapak yang lain ini tidak ada. Hanya Menpan-RB yang mengungkapkan ini. Maksud saya ke depan, harusnya harus ada *rule model*, Harus ada SOP yang kita terapkan, yang kita *anu*-kan. Supaya, kita tahu bagaimana *outcome*, bagaimana program, bagaimana kegiatan, apakah tercapai? Kenapa tidak tercapai? Apa terobosan yang harus kita lakukan? Harusnya kan begitu cara berpikir kita dalam membuat anggaran ini.

Kemudian, saya lihat rata-rata memang juga menyampaikan persentase realisasi anggaran 2024. Itulah rata-rata yang paling tinggi adalah BKN, arsip. Arsip nomor 1, 70,96%. BKN 70,2%. Berikutnya adalah Menpan-RB. Yang paling terendah itu adalah Lembaga Administrasi Negara cuma 60,49%.

Tentu saya berharap dengan waktu yang tinggal beberapa bulan dan saya selalu *me-warning* kementerian dan lembaga mitra kami ini. Bagaimanapun realisasi anggaran ini berpengaruh dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Pasti begitu.

Oleh karena itu, juga dalam rangka apa? Bagaimana maksimalisasi dan, purna daripada kegiatan dan program ini lebih bagus? Kita tidak tergo-poh-gopoh. Biasanya kan di akhir anggaran itu terpaksa, dipaksa, untuk bagaimana capainya mencapai 100%. Atau paling tidak mencapai ke sekian itulah. Oleh karena itu, saya berharap ke depan tentu ini juga harus menjadi perhatian kita bersama.

Saya lihat yang bisa melaporkan bagaimana realisasi anggaran 2023 hanya Menpan-RB. Berapa capainya? 98,63. Kami tidak tahu yang kementerian/lembaga yang lain. Biasanya, ada ini. Kan ada, memang kurang, cuma satu koma sekian.

Rata-rata kementerian/lembaga melaporkan tentang hal ini, ketika kita melakukan pembahasan anggaran. Hari ini kami hanya, saya pribadi yang mendapatkan, saya baca ini semuanya, Pak. *Nih*, saya baca. Ketika Bapak memaparkan, hanya satu kementerian/lembaga yang menyampaikan ini

tentang realisasi. Tadi saya katakan programnya, sasarannya, bagaimana capainya, *outcome*-nya itu diungkapkan. Realisasinya juga pun disampaikan.

Terakhir adalah saya sengaja secara umum menyampaikan, Ketua, tidak satu per satu. Berkaitan tentang tambahan anggaran, rata-rata semuanya minta anggaran. Bagi kami tidak masalah.

Saya mengatakan selalu Menpan-RB ini bagaimana *me-grand design*. Harusnya T-T, Pak. Bukan M-M ini terlalu kecil, kata saya. Bapak kan akan melaku *grand design* tentang reformasi, birokrasi, aparatur. Sekarang ini masih mengeluh masyarakat, Pak. Tapi, saya lihat indikatornya bagus-bagus. Bapak bisa pergi ke pasar-pasar, pergi ke seluruh kabupaten/kota, masih berkeliaran itu para ASN di mal-mal, Pak, pada jam kerja. Dia pakai baju dinas. Enggak tahu saya yang jelas apa, bagaimana dan lain sebagainya. Ini kan juga *bahagian* daripada mereformasi aparatur itu. Iya. Kita enggak, kita enggak bicara apakah dia honorer. Selagi dia menjadi *bahagian* daripada bekerja di pemerintahan, tentu taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Terakhir yang saya katakan tadi adalah tambahan anggaran. Yang paling signifikan meminta anggaran itu adalah arsip. Hampir-hampir dua kali, hampir-hampir tiga kali lipat. Bukan dua, hampir. Arsip itu anggarannya 251 sekian. Ini minta 239 M sekian dengan indikator yang disampaikan. Ini pun juga bermasalah. Kenapa sampai diusulkan sebanyak 400 sekian? Hanya diplot sekian, padahal pada tahun sebelumnya sudah terjadi peningkatan. *Nah*, ini *nih* juga persoalan dalam perencanaan itu.

Jadi, rata-rata apakah Menpan-RB minta 116, kemudian BKN 100 M, LAN 121, arsip 239, Ombudsman 201. Dan saya, *insya Allah*, semua apa yang Bapak minta itu, menurut saya, kepada kawan-kawan di Komisi II ini kita berikan apresiasi. Jangan dikurangi Rp1,00 pun terhadap penambahan anggaran yang diminta. Persoalannya nanti di Badan Anggaran kita harapkan kawan-kawan bisa memperjuangkan apa yang Bapak/Ibu sampaikan dan dimintakan kepada Komisi II.

Barangkali demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih, Pak Gaus.

Nanti dijawab secara ringkas saja karena sebenarnya kita sudah pernah bahas di konsinyering. *Nah*, saya minta mohon doanya. Kita doakan Pak Gaus

jadi Bupati. Jadi karena kemarin dia sibuk jadi Bupati, makanya enggak ikut konsinyering. *Nanya*, tapi nanti dijawab singkat saja, ya.

Oke.

Terima kasih, Pak Gaus.

Pak Riyanta.

**F-PDIP (RIYANTA S.H.):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Izin, Pimpinan.

Saya bicara di luar anggaran. Karena, pada prinsipnya kawan-kawan Komisi II semua setuju dengan apa yang sudah disampaikan mitra.

Yang pertama, izin Pak Kamran, saya akan sedikit menanggapi yang disampaikan Bapak. Mungkin agak berbeda, karena saya ini termasuk orang yang agak *ngelidis*. Intinya, kalau berbicara persoalan yang berkaitan dengan calon penerimaan ASN maupun PPPK, saya melihat ini sudah cukup bagus. Bahkan saya akan katakan bagus. Termasuk, apa yang berkaitan dengan sekolah-sekolah kedinasan itu yang sistemnya di BKN Pak, ya, itu bagus. Benar-benar tidak bisa ditembus.

Kemudian, berkaitan dengan mal-mal pelayanan publik Pak, Pak Menpan. Itu kondisi yang sebenarnya. Sebenarnya setelah adanya unit-unit mal-mal pelayanan publik maupun program pelayanan, apa, PTSP, ini masyarakat pengguna jasa layanan itu sebenarnya malah lebih sulit.

Di sini ada dari Ombudsman. Barangkali, berkaitan dengan layanan-layanan yang berkaitan dengan pertambangan maupun perizinan-perizinan yang lain. Saya yakin di Ombudsman banyak laporan-laporan pengaduan yang masuk. Ini karena memang sistemnya yang, kalau Pak Jokowi, kan mudah. Dengan digitalisasi, set-set-set-set selesai. Tapi, dalam praktiknya itu tidak seperti itu, Pak.

Contoh persoalan, perizinan pertambangan. Kemudian, persoalan perizinan air tanah. Kemudian, pengalihan fungsi-fungsi, aset-aset BUMN, yang seperti contoh ada pengalihan sungai. Itu waktunya lama karena harus melayani seluruh Indonesia. Barangkali, kali ini perlu menjadi renungan kita bersama. Bagaimana agar peran pemerintah provinsi sebagai perwakilan dari pemerintah pusat itu lebih baik dioptimalkan.

Ini kita harus *fair*. Harus jujur. Sekarang yang berkaitan dengan perizinan pertambangan karena izinnya enggak keluar-keluar, akhirnya laporan ke Ombudsman. Dan mohon maaf, tapi saya ini belum bisa membuktikan, itu tidak



gratis. Jadi, untuk sebuah rekomendasi dari Ombudsman pun informasinya tidak gratis. Khususnya, yang berkaitan dengan pertambangan. Saya yakin kawan-kawan pelaku politik pun memahami soal ini. Karena, bukan tidak mungkin kawan-kawan yang pelaku politik juga termasuk di dalam permohonan izin pertambangan itu.

Ini sebagai, sebagai satu informasi untuk bagaimana kita melakukan evaluasi bersama. Karena, kalau kita-kita sebagai Anggota DPR melihat kayak begini, kita diam. Rasanya *kok* dosa. Dan bagi saya lebih baik saya tidak menjadi Anggota DPR.

Kemudian, berkaitan dengan layanan perwakilan Ombudsman, khususnya di Jawa Tengah dan Jogja. Saya jujur melakukan apresiasi yang tulus. Jadi, kawan-kawan di perwakilan *alhamdulillah* menurut saya juga sudah cukup bagus, cukup ramah. Hanya kalau yang perwakilan di Jogja itu, ada persoalan yang berkaitan dengan laporan warga masyarakat berkaitan dengan pelayanan di Badan Pertanahan Nasional Jogja. Khususnya, yang berkaitan dengan perpanjangan HGB. Di mana laporan ke Ombudsman itu dari tahun 2016 sampai hari ini, belum ada kesimpulannya.

Beberapa waktu yang lalu, saya sempat komunikasi dengan kepala perwakilan. Informasinya mau diselesaikan di akhir bulan Agustus. Awal September, saya datang secara langsung di Ombudsman perwakilan. Juga kenyataannya, itu belum selesai.

*Nah*, saya ingin Ombudsman ini juga berperan sesuai dengan semangat pembentukannya. Jadi, jangan sampai karena di Jogja, kemudian kejadiannya seperti sekarang ini. Yang laporan 2016 sampai ini, 2023, belum selesai. Alasannya banyak aturan-aturan yang harus dikaji. Saya kira untuk mengkaji sebuah aturan cukup 1-2 jam selesai itu. Karena juga, aturannya tidak terlalu banyak.

Terakhir, saya kira cukup itu, Pak.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

*Walaikumsalam warahmatullahi.*

Terima kasih, Pak Riyanta.

Gerakan jalan lurus. Jadi, nanti habis ini tadi yang berkaitan terutama banyak dari Ombudsman, ya Pak ya, nanti tolong di-*follow up* saja. Kalau jawabannya tertulis, tapi kalau memang perlu ditindaklanjuti saya langsung di ini, Pak Riyanta.

Cukup ya?

*Nah*, silakan langsung saja yang dituju kalau ada pertanyaan. Kalau saran dan masukan, tampung, catat. Kalau bisa, kerjakan.

*Nah*, itu saja ya. Jadi, enggak usah ditanggapi.

Silakan. Ada tadi kayaknya dari Pak Menteri. Enggak ada, ya? Ada enggak? Ada ya?

Silakan.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI (ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.):**

Iya.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Terima kasih atas, apa namanya, respons, tanggapan dan lain-lain.

Terkait dengan pengadaan CPNS, saya kira ini performa terbaik sebenarnya, Pak Ketua. Karena sudah kita pakai *double-face recognition*. Dulu kan sempat ramai ada joki. Dengan *face recognition* ini, joki tidak bisa lagi. Karena begitu masuk dengan wajah yang berbeda, soal akan berhenti untuk dibahas dan lain-lain.

Saya kira nanti kami kerjakan, Pak Ketua, terkait dengan masukan. Begitu juga terkait dengan Pak Riyanta, terkait dengan MPP. MPP banyak sekali yang bagus, tapi ada yang macet karena tidak integrasi.

Yang terakhir, terkait dengan digitalisasi. Kita sedang diminta untuk memaksa pengintegrasian. *Nah*, sekarang aplikasi terlalu banyak. Bupati baru, Kepala Dinas baru, bikin aplikasi baru. Akhirnya apa? Banyak aplikasi, rakyat tambah bingung karena enggak *nyambung*. *Nah*, kami sekarang dipaksa untuk menyambungkan itu dengan adanya GTE.

Saya kira itu, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

Baik.

BKN ada?

**Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI (Drs. HARYOMO DWI PUTRANTO, M.Hum.):**

Terima kasih, Pak Gaus atas masukannya.

Jadi, nanti ke depan kami akan memberikan laporan secara komprehensif. Hanya kami kemarin mungkin salah memaknai di surat dari DPR itu. Kita hanya diminta untuk melakukan penyesuaian RKA K/L tahun 2025, sehingga kami tidak memasukkan di tahun 2023.

Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

Baik.

Ada?

**Pit. KETUA LEMBAGA ADMINIDTRASI NEGARA RI (Dr. MUHAMMAD  
TAUFIQ, DEA.):**

Terima kasih.

Mungkin perlu kami sampaikan dan waktu untuk konsinyering kemarin kita sudah laporkan untuk serapan 2023 adalah 99%. 99,3%, Pak.

Dan mohon izin tadi mengenai serapan memang kita masih 60. Karena, ada beberapa yang jatuh temponya baru akhir triwulan yang ketiga. Termasuk, untuk sewa lisensi IT dan kemudian ada enam pusat pelatihan yang masih berjalan programnya sampai akhir triwulan ketiga. *Insy Allah*, kita 100%, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

Cukup?

Pak Najih, cukup? Ada? Ketua Ombudsman, cukup, Ada yang mau disampaikan?

Silakan.

**KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (MOHAMMAD NAJIH, S.H.,  
M.Hum., Ph.D.):**

Sedikit, Pak.

Baik.

Saya kira terima kasih kepada Bapak-Bapak atas respons yang baik dalam pertemuan ini.

Khusus untuk Pak Riyanta, kami sangat terima kasih. Akan segera kami tindak lanjuti untuk yang Jogja dan juga yang berkaitan dengan izin

pertambahan. Syukur, kalau hari ini Pak Riyanta kita bisa komunikasi, sehingga lebih jelas maksudnya. Supaya, kita bisa segera selesaikan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

Baik.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Ini saya kira tadi sudah, kita juga dengar, respons balik. Kita sudah bisa masuk kepada kesimpulan rapat kerja atau rapat dengar pendapat kita pada hari ini.

Silakan tampilkan.

Yang pertama,

1. Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2025 sebesar Rp359.980.127.000,00 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran tahun 2025 dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut:
  - a. Program dukungan manajemen sebesar Rp251.084.807.000,00;
  - b. Program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN sebesar Rp108.895.320.000,00.

Setuju, Bapak/Ibu sekalian?

**ANGGOTA RAPAT:**

Setuju.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

Bu Ses, angkanya sudah persis nih?

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PANRB (RINI WIDYANTINI, S.H., MPM.)**

Iya Bapak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

Ya. Oke.

**(RAPAT: SETUJU)**

2. Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Kepegawaian Negara tahun 2025 sebesar Rp798.324.991.000,00 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran tahun 2025 dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut:
  - a. Program dukungan manajemen sebesar Rp732.914.355.000,00;
  - b. Program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN sebesar...

Sebesar Didepan.

- b. ...sebesar Rp 65.428.636.000,00.

Ibu, sudah betul angkanya?

Setuju ya, Bapak/Ibu?

**(RAPAT: SETUJU)**

3. Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Lembaga Administrasi Negara tahun 2012 sebesar Rp315.388.668.000,00 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran tahun 2025 dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut:
  - a. Program dukungan manajemen sebesar Rp258.198.536.000,00;
  - b. Program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN sebesar Rp57.140.132.000,00.

Ibu, betul angkanya? Saya harus tanya. Kalau lebih, *alhamdulillah*. Kalau kurang nanti.

Setuju, ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

4. Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2025 sebesar Rp251.995.636.000,00 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran tahun 2025 dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut:
  - a. Program dukungan manajemen sebesar Rp205.450.783.000,00;
  - b. Program penyelenggaraan kearsipan nasional sebesar Rp46.544.853.000,00.

Ya, silakan.

**Plt. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Drs. IMAM GUNARTO, M.HUM.):**

Kami mengusulkan ada pergeseran anggaran tadi. Belum tertampung di sini atau di dokumen lain?

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

Waktu itu sudah disetujui di konsinyering, ya?

**Pit. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Drs. IMAM  
GUNARTO, M.HUM.):**

Sudah.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

Sudah. Sudah?

**Pit KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Drs. IMAM  
GUNARTO, M.HUM.):**

Iya.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

Iya.

Silakan.

**F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Mohon maaf, saya ingin koreksi sedikit bahasa itu nomor empat. Atau nomor tiga, tadi mungkin juga sama.

Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran. Bukan anggaran arsip. Anggaran itu anggaran badan arsip. Badan Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi, badan arsip enggak ada. Anggaran arsip enggak ada. Yang ada itu adalah badannya enggak atau apa nama organisasinya.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

Namanya Arsip Nasional Indonesia, Pak. Nama organisasinya.

**F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Eenggak ada pakai badan?

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

Enggak ada.

**F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

*Oke.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

*Oke.*

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

5. Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Ombudsman Republik Indonesia tahun 2025 sebesar Rp232.211.019.000,00 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran tahun 2025 dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut:
  - a. Program dukungan manajemen sebesar Rp 187.329.019.000,00;
  - b. Program pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sebesar Rp44.882.000.000,00.

Angkanya pas? *Oke.*

Setuju, ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

6. Terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh:
  - a. Kementerian PAN-RB sebesar Rp116.078.076.000,00;
  - b. BKN sebesar Rp100.000.000.000,00;
  - c. LAN sebesar Rp121.887.230.253,00;
  - d. ANRI sebesar 239 juta, maaf, Rp239.366.284.000,00;
  - d. ORI sebesar Rp 201.728.215.000,00.

Komisi II DPR RI menyetujui usulan tamban anggaran tersebut dan meminta kepada badan anggaran DPR RI untuk menambahkannya kepada, ke dalam pagu alokasi anggaran atau pagu definitif tahun 2025 masing-masing kementerian/lembaga tersebut melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

Setuju?

Baik kan, Komisi II ya. Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Dengan kita sudah menyepakati ada enam kesimpulan pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat kita pada siang hari ini, maka rapat kita ini sudah masuki pada sesi yang akhir.

Sebelum saya tutup, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta seluruh jajaran, kepada Kepala LAN, Plt. Kepala LAN, Plt. Kepala BKN, kemudian Kepala ANRI, dan Ketua Ombudsman.

Ini kok beda-beda ininya *nih*?

Silakan.

**Pit. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Drs. IMAM GUNARTO, M.HUM.):**

Yang pergeseran kami usulkan, belum masuk di dalam.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

Sudah disepakati di mana?

**Pit. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Drs. IMAM GUNARTO, M.HUM.):**

Di konsinyering.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

Itu nanti dilampirkan. Yang putusan itu kemarin akan jadi lampiran di sini juga.

**Pit. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (Drs. IMAM GUNARTO, M.HUM.):**

Siap.

Siap, terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI /F-PG):**

Iya.

Jadi, terima kasih buat semuanya. Dan karena ini mungkin rapat terakhir kita ya, kami atas nama seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II mengucapkan



terima kasih atas kerja sama Komisi II dengan Bapak-Bapak/Ibu semua sekalian selama lima tahun ini.

Dan sekaligus saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang berkenan dalam komunikasi dan banyak hal ya interaksi yang sudah kita lakukan selama lima tahun ini.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* *rabbi 'alamin*, maka Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat ini saya nyatakan ditutup.

Terima kasih.

Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk kita semua,

*Wa billahi taufik wal hidayah.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT SELESAI PUKUL 13.17 WIB)**

**a.n. KETUA RAPAT  
KABAG SET. KOMISI II DPR RI**



**Dahliya Bahnan, S.H., M.H.**  
**197504202002122002**